



LURAH HARGOREJO
KAPANEWON KOKAP KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH HARGOREJO
NOMOR 97 TAHUN 2025
T E N T A N G
PENGANGKATAN PENGURUS PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PADUKUHAN SE KALURAHAN HARGOREJO MASA BAKTI 2025-2030

LURAH HARGOREJO,

- Menimbang : a. bahwa Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga merupakan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang ada di kalurahan;
- b. bahwa untuk membantu tugas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kalurahan perlu dibentuk kepengurusan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Padukuhan se-Kalurahan Hargorejo;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Padukuhan se-Kalurahan Hargorejo Masa Bakti 2025-2030.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan

Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 77);
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 36);
16. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Hargorejo Tahun 2019 Nomor 13);
17. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Hargorejo Tahun 2020 Nomor 8); dan
18. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Periode Tahun 2022 – 2027 (Lembaran Kalurahan Hargorejo Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH HARGOREJO TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PADUKUHAN SE KALURAHAN HARGOREJO KAPANEWON KOKAP KABUPATEN KULON PROGO MASA BAKTI 2025-2030.

Pertama : Mengangkat Kepengurusan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Padukuhan se Kalurahan Hargorejo Masa Bakti 2025-2030 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepengurusan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Padukuhan se Kalurahan Hargorejo dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman pada Pedoman Dasar Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kalurahan dan peraturan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kalurahan dan Lurah Hargorejo.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Hargorejo
Pada 5 November 2025
LURAH HARGOREJO,

Cap/ ttd

BHEKTI MURDAYANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Sosial PPA Kabupaten Kulon Progo;
2. Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kulon Progo;
3. Panewu Kokap;
4. Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kapanewon Kokap;
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan Hargorejo;
6. Masing-masing pengurus yang tercantum dalam SK ini; dan
7. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH

Nomor : 97

Tahun : 2025

Tentang : Pengangkatan Pengurus
Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga Padukuhan Se
Kalurahan Hargorejo masa
bakti 2025-2030

SUSUNAN PENGURUS PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PADUKUHAN SE KALURAHAN HARGOREJO MASA BAKTI 2025-2030

1. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Padukuhan Gunung Kukusan

Jabatan	Nama
Ketua	Yuni Astuti
Wakil Ketua	Subiyem
Sekretaris 1	Istiqomah
Sekretaris 2	Sri Sudarni
Bendahara 1	Mujiyanti
Bendahara 2	Supiyah
Seksi Olahraga 1	Endri Suprapti
Seksi Olahraga 2	Supinah

2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Padukuhan Gunung Rego

Jabatan	Nama
Ketua	Marita Tri W.
Wakil Ketua	Daliyah
Sekretaris 1	Tya Ayu R.
Sekretaris 2	Sesaria R. D.
Bendahara 1	Suminah
Bendahara 2	Erlina

3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Padukuhan Ngaseman

Jabatan	Nama
Ketua	Denik Sri Leksonowati
Sekretaris 1	Yuli Widawarni
Sekretaris 2	Seti Utami
Bendahara	
Simpan Pinjam	Saliyem
Arisan	Dwi Suharni
Tabungan	Yuliningsih
PTKWI	Yusnarsih
Seksi Perlengkapan	Sumarsih; Suratmi; Dini

4. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Padukuhan Sambeng

Jabatan	Nama
Ketua	Jumarini
Wakil Ketua	Purwanti
Sekretaris 1	Subiyem
Sekretaris 2	Winarsih
Bendahara 1	Emi Ambarsari
Bendahara 2	Sri Utami
Seksi Olahraga 1	Sri Suryati
Seksi Olahraga 2	Legiyah

5. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Padukuhan Tejogan

Jabatan	Nama
Ketua	Ekawati Suprihatini
Sekretaris	Siti Khodijah
Bendahara 1	Wasiyem
Bendahara 2	Tiah
Pokja I	1. Saminah
	2. Sarjiyem
	3. Siti Wakijah

Pokja II	1. Titi Fibriyani
	2. Suneti
	3. Maria Ulfa
Pokja III	1. Giyanti
	2. Sudinah
	3. Asmilah
Pokja IV	1. May Agaphe Hia
	2. Yustina Nuryani
	3. Ning Suryaningsih

6. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Padukuhan Sangkrek

Jabatan	Nama
Ketua	Watini
Sekretaris	Siti Khoiriyah
Bendahara	Asrofah

7. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Padukuhan Selo Barat

Jabatan	Nama
Ketua	Siti Nur Aminah
Sekretaris	Wasiatun
Bendahara	Siti Sholihah

8. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Padukuhan Selo Timur

Jabatan	Nama
Ketua 1	Simping Suparni
Ketua 2	Eny Suprapti
Sekretaris 1	Susanti
Sekretaris 2	Sukartinem
Bendahara 1	Zeny Dwi Astuti
Bendahara 2	Sulasmi
Pokja I	1. Wartiyem

	2. Sih Panuti
	3. Susanti
Pokja II	1. Eny Suprapti
	2. Nur Widayanti
	3. Sumarsih
Pokja III	1. Simping Suparni
	2. Sukartinem
	3. Zeny Dwi Astuti
Pokja IV	1. Nining Desi Prastiwi
	2. Simping Widiyanti
	3. Siti Rokhimah

9. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Padukuhan Kliripan

Jabatan	Nama
Ketua	Sulastri
Wakil Ketua	Sunarti
Sekretaris	Suparmi
Wakil Sekretaris	Puji Triningsih
Bendahara	Supeni
Wakil Bendahara	Siti Aminah

10. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Padukuhan Penggung

Jabatan	Nama
Ketua	Mardiningsih
Wakil Ketua	Sadinem
Sekretaris 1	Suniyah
Sekretaris 2	Lies Retno Handayani
Bendahara	Sumiati
Seksi Tabungan	Siti Ngaisah
Seksi Arisan	Sri Lestari

11. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Padukuhan Pandu

Jabatan	Nama
Ketua	Ngatinem
Wakil Ketua	Sadiyanti
Sekretaris 1	Sri Hera Wati
Sekretaris 2	Farida
Bendahara 1	Tri Parjinem
Bendahara 2	Sukamti
Seksi Pendidikan dan Ketrampilan	Esti Suwarni; Sukasminah
Seksi Sosial dan Keagamaan	Sijemi; Suwanti

12. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Padukuhan Anjir

Jabatan	Nama
Ketua 1	Sri Suprapti
Ketua 2	Sumarni
Sekretaris 1	Sutarmi
Sekretaris 2	Sarijem
Bendahara 1	Ngesti Eka Rini
Bendahara 2	Suwarni
Seksi Kesjahteraan Sosial	Astiwi Rahayu; Iin Wandari

13. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Padukuhan Krengseng

Jabatan	Nama
Ketua	Kemiyati
Sekretaris 1	Suryaningsih
Sekretaris 2	Septi Nuramala Dewi
Bendahara 1	Umi Rosidah
Bendahara 2	Rini Setyaningsih
Seksi Olahraga	Indriyani; Kiky Dwi Nilawati

14. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Padukuhan Sindon

Jabatan	Nama
Ketua	Suratmiyatun
Sekretaris	Wiwin Budi Rahayu
Bendahara 1	Sumarmi
Bendahara 2	Nur Wijiyanti
Pokja I	1. Mardinem
	2. Fitri Retno
	3. Nurwulansari
Pokja II	1. Retnaningsih
	2. Sri Tarmini
	3. Siti Aisyah
Pokja III	1. Dwi Sugiyanti
	2. Sarijah
	3. Maryanti
Pokja IV	1. Sugiarti
	2. Pur Dwi Astuti
	3. Sunarti

15. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Padukuhan Ngulakan

Jabatan	Nama
Ketua	Tugiasih
Wakil Ketua	Hariyati
Sekretaris 1	Dini Novianti
Sekretaris 2	Harniyanti
Bendahara 1	Siwi Atminaryatun
Bendahara 2	Rohmi
Seksi Simpan Pinjam	Maria Tyas Minarti
Seksi Simpan Pinjam	Siti Nurjanah
Seksi Simpan Pinjam	Etty Widyaningsih

16. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Padukuhan Kriyan

Jabatan	Nama
Ketua 1	Novi Nurhasanah
Ketua 2	Ning Riyanti
Sekretaris 1	Nuryani
Sekretaris 2	Esti Winarni
Bendahara 1	Budi Setyaningsih
Bendahara 2	Sutani

Hargorejo, 5 November 2025
LURAH HARGOREJO,

Cap/ ttd

BHEKTI MURDAYANTO

